

## **Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)**

**Widiyawati**

(Alumni jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: widiyawati24@gmail.com)

**Halmawati**

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halmawati\_74@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine: (1) The effect of proportion on independent board ERM disclosure, (2) The effect of the audit committee on ERM disclosure, (3) The effect of the ownership dispersion on ERM disclosure, (4) The effect of firm size on ERM disclosure. Population in this research are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2017. The sample is determined based on purposive sampling method, thus totaling 60 companies. The data used in this research is secondary data. The technique of collecting data by the method of documentation at [www.idx.com](http://www.idx.com). The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that: (1) Proportion on independent board no significant effect on the ERM disclosure, (2) The audit committee no significant effect on the ERM disclosure, (3) Ownership dispersion no significant effect on the ERM disclosure, and (4) Firm size influence a significant positive on ERM disclosure.*

**Keywords:** Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure, Proportion of Independent

### **1. Pendahuluan**

ERM disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang (Nurhayati, 2016). ERM disclosure yang dilakukan oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan investasi. ERM disclosure juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholder

Miihkinen (2012) dalam Meliani dan Hermawan (2014) menyatakan juga bahwa informasi mengenai ulasan risiko menolong investor eksternal untuk mengestimasi arus kas mendatang, serta sebagai sumber informasi terkait ketidakpastian risiko yang tidak terdiversifikasi. Luas pengungkapan manajemen risiko menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola manajemen risikonya dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Kumalasari, 2014).

ERM disclosure berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance khususnya pada prinsip transparansi. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan ERM yang telah dipublikasikan

dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance (2011) yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (Agista dan Mimba, 2017). Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan bahwa ERM disclosure dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah corporate governance (Ratna dan Chariri, 2013; Maulani dan Rahayu, 2015; Sulistyaningsih dan Barbara, 2016). Penelitian ini mengukur mekanisme corporate governance dengan proksi proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan saham publik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ERM disclosure dipengaruhi secara positif oleh dewan komisaris independen (Ratna dan Chariri, 2013; Kurniawanto *et al.*, 2017; Probohudono *et al.*, 2011). Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM disclosure, karena dewan komisaris independen merupakan perwakilan independen dari kepentingan para stakeholder sehingga dewan komisaris independen dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan (ERM disclosure). Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Agista dan Mimba (2017), dan Putri (2013)

menemukan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen.

Pengawasan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagian besar diamanatkan kepada komite audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai dan kehadiran komite audit di perusahaan publik mampu meningkatkan transparansi pertanggungjawaban manajemen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) Pengungkapan manajemen risiko pada perbankan syariah dipengaruhi oleh ukuran komite audit. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Maulani dan Rahayu (2015), dan Mubarok (2013) menemukan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi oleh ukuran komite audit.

Kepemilikan saham publik yang tinggi membuat perusahaan berada dalam tekanan, karena kepemilikan saham publik yang tinggi menandakan semakin banyaknya pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tahunan perusahaan sehingga perusahaan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas terkhusus mengenai manajemen risiko perusahaan (ERM *disclosure*).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2016) menemukan bahwa ERM *disclosure* dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan saham publik. Hasil penelitian Yuniarti diperkuat oleh Sulistyarningsih dan Barbara (2016), dan Indriyani (2014). Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Aprilia (2015), dan Ruwita (2013) yang menyatakan bahwa ERM *disclosure* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan saham publik.

Faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu menemukan bahwa ERM *disclosure* juga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran perusahaan (Utami, 2015). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Ruwita (2013), dan Probohudono *et al.*, (2011). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya perusahaan yang besar cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik (Hassan, 2009).

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2016), dan Sulistyarningsih dan Barbara

(2016) yang mengemukakan bahwa ERM *disclosure* tidak berpengaruh oleh ukuran perusahaan. ERM *disclosure* diukur dengan menggunakan dimensi *International Standard Organization* (ISO) 31000:2009. ERM *disclosure* yang diukur menggunakan dimensi ISO 31000. Dimensi ISO 31000 merupakan salah satu standar manajemen risiko sebuah organisasi yang digunakan di dunia.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Enterprise Risk Management* (ERM) *Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”.

## 2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis

### 2.1 Signalling Theory

*Signaling theory* menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal (Wolk, *et al.*, 2001). ERM *disclosure* dapat menjelaskan bagaimana manajer harus memberikan informasi yang memadai mengenai risiko yang dihadapi perusahaan.

Pengungkapan informasi mengenai risiko secara memadai merupakan sinyal baik (*good news*) bagi perusahaan bahwa telah melakukan manajemen risiko dengan baik. Manajer yang tidak mengungkapkan informasi mengenai risiko secara memadai merupakan sinyal buruk (*bad news*) bagi perusahaan karena akan memberikan persepsi bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen risiko dengan baik (Fajriah, 2017).

### 2.2 Agency Theory

*Agency theory* merupakan teori yang berkaitan dengan kontrak antara manajer (agen) dengan pemilik (*principal*) (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* dan *agent* mempunyai perbedaan kepentingan yang menyebabkan timbulnya asimetri informasi, sehingga membutuhkan pelaksanaan *corporate governance* karena menyoroiti hubungan langsung antara prinsipal dan *agent*.

*Corporate governance* dalam sebuah perusahaan diperlukan sebagai sarana yang memastikan perusahaan dimonitor. Pelaksanaan *corporate governance* dapat dilaksanakan dengan ERM *disclosure*, karena pengungkapan manajemen risiko dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk

memperkuat struktur *corporate governance* dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. ERM *disclosure* oleh sebuah perusahaan membuat kualitas laporan keuangan perusahaan akan meningkat, karena informasi yang disajikan oleh perusahaan akan lebih transparan (Sulistyaningsih dan Barbara, 2016).

### 2.3 Enterprise risk management (ERM) Disclosure

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/25/PBI/2009 perubahan atas Nomor: 5/8/PBI/2003, menjelaskan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi dalam mencegah terjadinya risiko (Anisa, 2012).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadikan ERM sebagai bagian penting perusahaan dalam mempertahankan kinerja dan tingkat profitabilitas perusahaan. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker *et al.*, 2002 dalam Utami 2015). Setiap perusahaan membutuhkan ERM untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin muncul. Struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada *stakeholders* organisasi (Subramaniam *et al.*, 2009).

Peraturan mengenai adanya informasi terkait risiko yang harus dilaporkan perusahaan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 (Revisi 2014) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. PSAK 60 menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan.

Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif, sehingga

memungkinkan pengguna memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko.

Peraturan lainnya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lingkup Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) sebagai rujukan agar terciptanya praktik *good corporate governance* dan ERM yang lebih baik yaitu POJK No.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Peraturan lainnya keputusan ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Pada bagian tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) disebutkan bahwa tata kelola perusahaan memuat uraian singkat mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan meliputi: gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan, jenis risiko dan cara pengelolaannya serta review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.

Peraturan mengenai pengungkapan risiko perusahaan dirancang untuk memperbaiki transparansi informasi bagi investor dan analis, sehingga mengurangi distorsi pasar dan meningkatkan efisiensi pasar modal (Abraham dan Marston, 2012 dalam Meliani dan Hermawan, 2014), namun peraturan mengenai pengungkapan risiko di Indonesia masih terbatas (Meliani dan Hermawan, 2014).

### 2.4 International Standard Organization (ISO) 31000

International Standard Organization (ISO) 31000 merupakan salah satu standar manajemen risiko sebuah organisasi yang digunakan di dunia. Di Indonesia Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi standar ISO tersebut ke dalam Standar Nasional Indonesia ISO 31000:2011 Manajemen risiko – Prinsip dan panduan pada 20 Oktober 2011 (Agista dan Mimba, 2017). Perbedaan ISO 31000 dengan standar manajemen risiko yang lain adalah perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan dengan lainnya. Kerangka kerja manajemen risiko yang merupakan implementasi prinsip manajemen mutu dan dikenal dengan "*Plan-Do-Check-Action*" (Susilo dan Kaho, 2011:7 dalam Utami, 2015).

Standar ISO 31000 menyediakan panduan generik, hal ini tidak dimaksudkan untuk melakukan keseragaman. Penerapan manajemen risiko akan tergantung pada kebutuhan yang bervariasi dari setiap organisasi, khususnya sasaran dari setiap organisasi yang berbeda, konteks, struktur, produk, jasa, proyek, dan proses operasi, serta praktik-praktik khas yang digunakan. Kerangka kerja manajemen risiko ditujukan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dari kerangka kerja manajemen risiko ke dalam kebutuhan khas organisasi tersebut.

### 2.5 Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* pada bulan April 1998. Prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut mencakup lima hal berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham.
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan.
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi.

### 2.6 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 tahun 2014 pasal 1 mendefinisikan komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 juli 2000. BEJ mewajibkan perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional samadengan jumlah yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (non controlling shareholders).

Menurut POJK No 33 tahun 2014 pasal 20, dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris. Masa jabatan komisaris independen dan direktur independen berdasarkan Surat Edaran No SE0001/BEI/02-2014 paling banyak dua periode berturut-turut.

### 2.7 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Komite audit yang dibentuk dalam perusahaan sebagai sebuah komite khusus diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh dewan komisaris.

### 2.8 Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik adalah kepemilikan saham masyarakat umum/publik dalam perusahaan (Sulistyaningsih dan Barbara, 2016). Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan secara luas ada di tangan publik (Ruwita, 2012). Semakin banyak saham dimiliki oleh publik, maka perusahaan akan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas. Pengungkapan informasi tersebut mencakup mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dan cara pengelolaannya.



## 2.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Meningkatnya total aset diikuti dengan meningkatnya modal yang ditanam sehingga tingkat penjualan semakin tinggi. Ketika penjualan meningkat, perputaran uang akan semakin besar menyebabkan tingginya kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar yang tinggi akan membuat perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat sehingga menyebabkan pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan semakin besar.

## 2.10 Hubungan Antar Variabel

### 2.10.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap ERM Disclosure

Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM disclosure. Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin luas pengungkapan informasi mengenai ERM disclosure (Ratna dan Chariri, 2013; Kurniawanto *et al.*, 2017, Probodono *et al.*, 2011).

Dewan komisaris independen merupakan perwakilan independen dari kepentingan para *stakeholder* sehingga dewan komisaris independen dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan (ERM disclosure).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna dan Chairiri (2013), Kurniawanto *et al.* (2017), Probodono *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap ERM disclosure. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Agista dan Mimba (2017), Saufanny dan Khomsatun (2017), dan Putri (2013) menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah:

**H1:** Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM disclosure.

### 2.10.2 Pengaruh Komite audit Terhadap ERM Disclosure

Komite audit dapat membatasi insentif buruk manajemen untuk mempengaruhi praktik ERM disclosure dan juga berpengaruh bagi penurunan tingkat asimetri informasi. Komite audit juga bertanggung jawab dalam mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol termasuk identifikasi risiko (KNKCG, 2002).

Komite audit berkewajiban memastikan transparansi secara maksimal oleh perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin luas tingkat pengungkapan informasi perusahaan mengenai ERM disclosure (Saufanny dan Khomsatun, 2017), karena pengawasan manajemen risiko sebagian besar diamanatkan kepada komite audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai dan kehadiran komite audit di perusahaan publik mampu meningkatkan transparansi pertanggungjawaban manajemen.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) yang menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Miftakhurrahman (2015), Maulani dan Rahayu (2015), dan Mubarok, (2013) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua adalah:

**H2:** Komite Audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM disclosure.

### 2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap ERM Disclosure

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan secara luas ada di tangan publik (Ruwita, 2012). Semakin banyak kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin luas pengungkapan informasi oleh perusahaan termasuk mengenai ERM disclosure (Yuniarti, 2016). Kepemilikan saham publik yang tinggi membuat perusahaan berada dalam tekanan, karena kepemilikan saham publik yang tinggi menandakan semakin banyaknya pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tahunan perusahaan sehingga perusahaan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan

*stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas terkhusus mengenai manajemen risiko perusahaan (ERM *disclosure*).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yuniarti (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap ERM *disclosure*. Hasil penelitian Yuniarti diperkuat oleh Sulistyaningsih dan Barbara (2016), Indriyani (2014). Penelitian tersebut namun berbeda dengan Aprilia (2015), Ruwita (2013) yang mengemukakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap ERM *disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah:

**H3:** Proporsi Kepemilikan Saham Publik berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM *disclosure*.

#### 2.10.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap ERM Disclosure

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik (public demand) akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat didalamnya, hal ini juga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

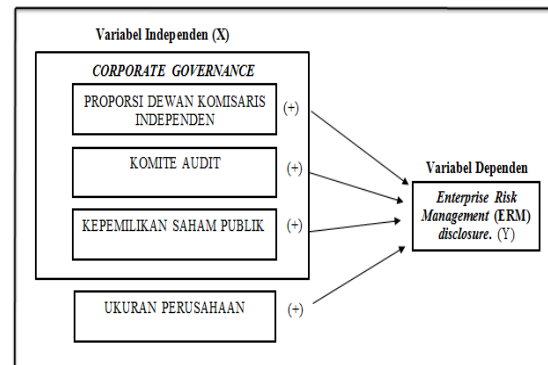
Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan (ERM *disclosure*) (Utami, 2015 dan Ruwita (2013) karena, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya perusahaan yang besar cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik (Hassan, 2009).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jannah (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian Jannah diperkuat oleh Ruwita (2013), Maulani dan Rahayu (2015). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Almilia (2013), Yuniarti (2016) yang mengemukakan

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ERM *disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat adalah:

**H4:** Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM *disclosure*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

### 3 Metode Penelitian

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kausatif. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode pengamatan tahun 2014-2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan bantuan program *Eviews8*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

#### 3.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

##### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ERM *disclosure*. Pengukuran variabel ERM *disclosure* menggunakan indeks ERM *framework* yang dikeluarkan oleh ISO 31000:2009 dengan 25 item yang terbagi menjadi 5 dimensi yaitu mandat dan komitmen, perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, monitoring dan review kerangka kerja manajemen risiko dan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berlanjut.

Perhitungan item pengungkapan menggunakan pendekatan nilai dikotomis dengan ketentuan nilai 1 untuk item yang diungkapkan sedangkan 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Setiap item yang diungkapkan kemudian dijumlahkan lalu dibagi dengan total item yang seharusnya diungkapkan. Rasio yang digunakan halnya dengan penelitian Agista dan Mimba (2017), Devi *et al.*, (2017) dan Utami (2015) yaitu:

$$ERMDI = \frac{\sum ij Ditem}{\sum ij ADitem}$$

Keterangan:

ERMDI : ERM Disclosure Index

$\sum ij$  Ditem : Total Skor Item ERM yang diungkapkan

$\sum ij$  Aditem: Total Item ERM Disclosure

### 3.2.2 Variabel Independen

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan skala rasio yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris (Agustina, 2014).

$$\frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang terdapat dalam suatu perusahaan (Utomo dan Chariri, 2014). Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini menggunakan ukuran persentase (%) saham yang dimiliki oleh publik (Anisa, 2012) dengan menggunakan rumus:

$$KSP = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki publik}}{\sum \text{Saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang diukur dengan mengetahui total aktiva yang dimiliki perusahaan. Variabel ukuran perusahaan diwakili dengan menggunakan total aset perusahaan (Ruwita, 2013).

$$SIZE = \ln(\text{total aset})$$

## 3.3 Teknik Analisis Data

### 3.3.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	41.1639	3.08333	24.1828	28.2810	0.681833
Maximum	80.0000	5.00000	100.0000	32.15098	0.960000
Minimum	20.0000	2.00000	0.570275	25.21557	0.240000
Std. Dev.	10.93577	0.4589	16.076	1.521081	0.137
Observations	240	240	240	240	240

Sumber: Data olahan views8 tahun 2018

Pada tabel diatas terlihat jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 240 observasi. Variabel dependen Enterprise Risk Management (ERM) disclosure (Y) memiliki mean (rata-rata) sebesar 0.681833 dengan standar deviasi 0.137. Nilai ERM disclosure yang maksimum sebesar 0.960000 dan nilai minimum sebesar 0.240000.

Variabel independen yang pertama adalah proporsi dewan komisaris independen (X1) yang memiliki mean (rata-rata) sebesar 41.16369 dengan standar deviasi sebesar 10.93577. Nilai proporsi dewan komisaris maximum dan minimum adalah sebesar 80.00000 dan 20.00000. Variabel independen yang kedua adalah komite audit (X2) yang memiliki mean (rata-rata) sebesar 3.083333 dengan standar deviasi 0.4589. Nilai komite audit maximum dan minimum adalah sebesar 5.00000 dan 2.00000. Variabel independen yang ketiga adalah kepemilikan saham publik (X3) yang memiliki mean (rata-rata) sebesar 24.18284 dengan standar deviasi sebesar 16.076. Nilai Kepemilikan saham publik yang maximum dan minimum adalah sebesar 100.0000 dan 0.570275. Variabel independen keempat adalah ukuran perusahaan (X4) yang memiliki mean (rata-rata) sebesar 28.28100 dengan standar deviasi sebesar 1.521081. Nilai ukuran perusahaan maximum dan minimum adalah sebesar 32.15098 dan 25.21557.

## 4.2 Analisis Induktif

### 4.2.1 Analisis Model Regresi Panel

#### 1) Chow Test

Uji *Chow* adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji *Chow*:

H0: *Common Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan H0 adalah dengan menggunakan pertimbangan Statistik *Chi-Square*, jika probabilitas dari hasil uji *Chow-test* lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka Ha diterima dan sebaliknya. Hasil uji *Chow* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.897279	(59,176)	0.0000
Cross-section Chi-square	590.154359	59	0.0000

Berdasarkan hasil uji *Chow-Test* di atas didapat probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitasnya kecil dari level signifikan ( $\alpha = 0,05$ ), maka H0 untuk model ini di tolak dan Ha diterima, sehingga model estimasi yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model*, sehingga perlu dilanjutkan ke uji *Hausman*.

#### 2) Hausman Test

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari signifikansinya ( $\alpha < 0,05$ ) maka model yang tepat adalah *fixed effect* dan sebaliknya. Jika model *common effect* atau *fixed effect model* yang digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik, namun apabila model yang digunakan dan yang terpilih adalah *random effect model*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : *Random Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Tabel 3. Hasil uji hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.978141	4	0.9131

Sumber : Olahan data *Eviews8* tahun 2018

Berdasarkan hasil uji *Hausman* menggunakan *Eviews*, diperoleh probabilitas sebesar 0,9131. Nilai probabilitas ini lebih tinggi dari level signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Ini berarti H0 untuk model ini di terima dan Ha ditolak, sehingga model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model (REM)* sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji asumsi klasik.

### 4.2.2 Model Regresi Panel

#### a. Model Regresi Panel

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect (Lampiran)*, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = -1.274427 + 0.000412X_1 + 0.001620X_2 + 0.000149 X_3 + 0.068269X_4$$

Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -1.274427 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas yaitu proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan maka *ERMdisclosure* akan berkurang sebesar -1.274427.

Variabel proporsi dewan komisaris independen (PDKI) memiliki koefisien regresi sebesar 0.000412, hal ini berarti bahwa jika variabel proporsi dewan komisaris independen meningkat sebesar satu satuan maka variabel *ERMdisclosure* mengalami peningkatan sebesar 0.000412 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap. Variabel komite audit (KA) memiliki koefisien regresi sebesar 0.001620, hal ini berarti bahwa jika variabel komite audit meningkat satu satuan maka variabel *ERM disclosure* meningkat sebesar 0,001620 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.

Variabel kepemilikan saham publik (KSP) memiliki koefisien regresi sebesar 0.000149, hal ini berarti bahwa jika variabel



kepemilikan saham publik meningkat satu satuan maka variabel *ERMdisclosure* meningkat sebesar 0.000149 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki koefisien regresi sebesar 0.068269, hal ini berarti bahwa jika variabel ukuran perusahaan meningkat satu satuan maka variabel *ERMdisclosure* meningkat sebesar 0.068269 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.

#### 4.2.3 Uji Kelayakan Model

##### 1. Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* (Lampiran) diperoleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.920495. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 92,0495% dan sebesar 7,9505% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model pada penelitian ini.

##### 2. Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* (Lampiran) diperoleh nilai probabilitas (*F-statistic*) yang diperoleh lebih kecil dari nilai  $F_{hitung} = 44,92208 > F_{tabel} = 2,410058$  dengan nilai probabilitas = 0,00000 < nilai signifikansi = 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel *Enterprise Risk Manajement (ERM) disclosure* dan model regresi yang diperoleh dapat diterima sehingga layak dilanjutkan untuk pengujian secara parsial.

##### 3. Uji Hipotesis (t-Test)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *ERM disclosure*. Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* (Lampiran) dapat dilihat bahwa koefisien regresi proporsi dewan komisaris independen bernilai positif sebesar 0.000412 dan memiliki nilai  $t_{hitung} = 0,548326 < t_{tabel} = 1,98304$  dan nilai probabilitas = 0,5842 > nilai signifikansi = 0,05, berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *ERM disclosure*. Kesimpulannya adalah **hipotesis pertama (H1) ditolak**.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *ERM disclosure*. Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* (Lampiran) dapat dilihat bahwa koefisien regresi komite audit bernilai positif sebesar 0.001620 dan memiliki nilai  $t_{hitung} = 0,125423 < t_{tabel} = 1,98304$  dan nilai probabilitas = 0,9003 > nilai signifikansi = 0,05, artinya, komite audit tidak berpengaruh terhadap *ERM disclosure*. Kesimpulannya adalah **hipotesis ke-dua (H2) ditolak**.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan positif terhadap *ERMdisclosure*. Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* (Lampiran) dapat dilihat bahwa koefisien regresi kepemilikan saham publik bernilai positif sebesar 0.000149 dan memiliki nilai  $t_{hitung} = 0,387168 < t_{tabel} = 1,98304$  dan nilai probabilitas = 0,0002 > nilai signifikansi = 0,05, artinya, kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *ERMdisclosure*. Kesimpulannya adalah **hipotesis ke-tiga (H3) ditolak**.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *ERM disclosure*. Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* (Lampiran) dapat dilihat bahwa koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai positif sebesar 0.068269 dan memiliki nilai  $t_{hitung} = 4,249887 > t_{tabel} = 1,98304$  dan nilai probabilitas = 0,0000 < nilai signifikansi = 0,05, artinya, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *ERM disclosure*. Kesimpulannya adalah **hipotesis ke-empat (H4) diterima**.

#### 4.3 Pembahasan

##### 4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *ERM Disclosure*

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure*, artinya besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak akan mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi mengenai *ERM* oleh perusahaan. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Jensen, 1976 yang menyatakan bahwa semakin

besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi independensi dan efektifitas *corporate board*, sehingga manajemen risiko menjadi semakin efektif dan baik termasuk dalam hal pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Alasan ditolaknya hipotesis pertama disebabkan karena ketentuan mengenai proporsi komisaris independen sebesar 30% atau minimal 1 orang mungkin belum cukup tinggi bagi komisaris untuk mendominasi kebijakan perusahaan termasuk dalam penerapan dan pengungkapan ERM. Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas (>50,000%) mungkin dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Putri, 2013).

Alasan lain ditolaknya hipotesis pertama adalah karena adanya konflik kepentingan antara direksi dan dewan komisaris hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peran antara direksi dan dewan komisaris. Dewan komisaris yang mewakili pemegang saham mayoritas atau pemegang saham mayoritas itu sendiri akan sering mengintervensi direksi dalam pengambilan keputusan atau bisa juga pengambilan keputusan perusahaan terjadi tanpa melibatkan direksi, dan sebaliknya kecenderungan direksi yang kuat dikarenakan telah mewakili pemegang saham mayoritas atau pemegang saham mayoritas itu sendiri, sehingga meyebabkan efektifitas dan fungsi dewan komisaris independen menjadi terhambat (Effendi 2009:19). Fungsi dewan komisaris independen diantaranya adalah menjamin transparansi atau keterbukaan informasi oleh perusahaan, memastikan risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Agista dan Mimba (2017), Wijananti (2014), dan Putri (2013) yang mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Manajement (ERM) disclosure* dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanto et al., (2017) yang mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ERM *disclosure*.

#### 4.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap ERM *Disclosure*

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak

berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Manajement (ERM) disclosure*, artinya besar kecilnya komite audit tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan informasi terkait ERM *disclosure*. Komite audit dipandang sebagai mekanisme yang penting untuk meningkatkan transparansi perusahaan mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik, namun dalam penelitian ini keberadaan komite audit pada perusahaan belum bisa membuktikan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ERM *disclosure*.

Alasan hipotesis kedua ditolak adalah karena kinerja komite audit bukan hanya ditentukan dari kuantitas atau ukuran komite audit namun juga dari kualitas komite audit dalam perusahaan berupa kompetensi dan integritas. Fungsi komite audit yaitu melakukan pengawasan terhadap sistem pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan transparansi pertanggungjawaban manajemen. Fungsi tersebut tidak akan tercapai sebagaimana mestinya, karena lemahnya kompetensi dan integritas dari anggota komite audit dalam perusahaan.

Hal tersebut bisa saja dikarenakan pengangkatan komite audit yang hanya didasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga atau hubungan dekat lainnya (nepotisme), atau karena komite audit yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang memadai, sehingga tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tidak tercapai (Effendi 2009:36).

Lemahnya peranan dari komite audit dalam perusahaan berimbas pada kurangnya pengungkapan informasi yang lebih detail oleh perusahaan termasuk mengenai manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk manajement*). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maulani dan Rahayu (2015), Utami (2015), dan Mubarak (2013) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Manajement (ERM) disclosure*. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Saufanny dan Khomsatun (2017) yang mengemukakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

### 4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap ERM Disclosure

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure*, artinya besar kecilnya kepemilikan saham publik tidak akan mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi oleh perusahaan terkait ERM disclosure.

Alasan yang mendasari hipotesis ketiga ditolak adalah berdasarkan 60 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat 29 perusahaan yang memiliki kepemilikan saham publik kurang dari 20% sehingga kekuasaannya dianggap tidak banyak mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan termasuk mengenai ERM disclosure (Dewanti, 2017).

Alasan lainnya adalah pertimbangan manajemen terkait biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan informasi oleh perusahaan. Manajemen harus selektif dalam melakukan pengungkapan informasi karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan, sehingga tinggi atau rendahnya kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan informasi terkait ERM disclosure (Ruwita, 2013).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Aprilia (2015) dan Chariri, (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure*. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Sulistyaningsih dan Barbara (2016) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap ERM disclosure.

### 4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap ERM Disclosure

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diprosikan dengan total aset berpengaruh signifikan positif terhadap *Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure*, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin detail dan luas ERM disclosure, karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya

perusahaan yang besar cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik.

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktik *corporate governance* dengan lebih baik dibandingkan perusahaan kecil karena memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, dengan demikian informasi mengenai manajemen risiko akan lebih banyak diungkapkan karena termasuk dalam prinsip transparansi dalam praktik *corporate governance* (Maulana, 2016).

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin detail dan luas ERM disclosure yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, dengan tujuan dapat meningkatkan reputasi perusahaan melalui sistematika pengungkapan, karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menarik perhatian dari para *stakeholder* (Amran et al., 2009). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jannah (2016), Maulana dan Rahayu (2015), dan Ruwita (2013). Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Prayoga dan Almilia (2013) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
3. Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ERM disclosure pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.

Penelitian ini memiliki 2 keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh oleh peneliti hanya terbatas pada data yang dilaporkan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang dilaporkan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia sehingga ketika ada beberapa data yang tidak konsisten antara pengungkapan di awal laporan dengan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut akibatnya data yang dilaporkan perusahaan tersebut menjadi bias.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi perusahaan

Dewan komisi independen merupakan salah satu organ utama dalam perusahaan, agar fungsi dan peranan dari dewan komisaris independen dapat berjalan efektif maka sebaiknya organ perusahaan selalu bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga konflik kepentingan dan efektifitas peran masing-masing organ utama perusahaan dapat tercapai.

Komite audit merupakan organ pendukung dari terlaksananya *good corporate governance*, agar fungsi dan peranan dari komite audit dapat berjalan efektif maka sebaiknya pengangkatan anggota komite audit berdasarkan latar belakang pendidikannya. Anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang memadai dapat mendorong terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sehingga fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan, manajemen risiko perusahaan, dan internal control dapat terlaksana.

#### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada kategori perusahaan selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih baik, menggunakan variabel lain untuk melihat luas pengungkapan *Enterprise Risk Management (ERM) disclosure*, misalnya internal audit, karakteristik perusahaan. Penelitian

selanjutnya juga dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang lain seperti observasi secara langsung ke perusahaan.

#### Daftar Pustaka

- Agista, Gissel Glenda dan Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2017. *Pengaruh Corporate Governance Structure dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.20.1, Hal 439-441.
- Anisa, Gessy Windi. (2012). *Analisa Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010)*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.2 No.3. Halaman: 1-30.
- Aprilia, Farziana Tri. 2015. *Analisis Struktur Kepemilikan, Likuiditas, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)*. Skripsi. Universitas Bina Nusantara.
- Badan Standardisasi Nasional. 2011. *Manajemen Risiko- Prinsip dan Panduan (ISO 31000:2009)*.
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 perubahan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum*. Jakarta: Author.
- Bapepam-LK. 2012. *Peraturan Bapepam X.K.6 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012)*. Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Devi, Sunitha, Badera, I Dewa Nyoman, dan Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2017. *Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management Dan Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Juni 2017, Vol. 14, No. 1, hal 20 – 45.



- Fajriah, Siti Rohmatul. 2017. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Manajemen risiko (Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*. Skripsi.
- Hassan, Mustofa Kamal. 2009. *UAE Corporation-specific Characteristics And Level Of Risk Disclosure*. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, NO. 7, pp. 668-687.
- Jannah, Iin Manis Maidatul. *Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Jensen, Michael C, dan William Meckling. 1976. "Theory Of The Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economic* 3 (4): 305-360
- Maulani, Faizah Hikmi dan Sri Rahayu. 2015. *Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukurankomite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengadopsian Enterprise*. Skripsi. Telkomuniversity.
- Meliani, Ester Griffeine dan Hermawan, Ancella Anitawati. 2014. *Pengaruh Tingakt Pengungkapan Risiko Terhadap Asimetri Informasi Dengan Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit Serta Siklus Hidup Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi. Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Indonesia.
- Miftakhurahman, Riswan. 2015. *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Risk Management Committee Dan Reputasi Auditor Terhadap Enterprise Risk Management Pada Perusahaan BUMN Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Mubarok, M. A. (2013). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Dalam Laporan Keuangan Interim*. Diponegoro Journal of Accounting.
- Nurhayati. 2016. *Analisis Kualitas Komisaris Independen Terkait Dengan Risk Management Disclosure PT. Kalbe Farma Tbk Dan PT. Indo Farma Tbk Tahun 2012-2014*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Prayoga, Edo Bangkit dan Luciana Spica Almilia. 2013. *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4 Nomor 1 maret 2013. Halaman 1-18.
- Putri, Enestika Eka. 2013. *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Reputasi Auditor Dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi Coso ERM Framework) (Studi Empiris pada Perusahaan Nonfinancial yang Terdaftar di Bursa Efek ndonesia Periode Tahun 2009-2011)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ruwita, Cahya. 2013. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011)*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 2 Nomor 2 tahun 2013. Halaman 1-13.
- Subramaniam, Nava, L. McManus, and Jiani Zhang., 2009. *Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies*. *Managerial Auditing Journal*, 24(4), pp: 316-339.
- Sulistyaningsih, Barbara Gunawan. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Risk Management Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)*. Skripsi. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1). Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Utami, Isbriandien Cahya. 2015. *Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Audit, Komite Manajemen Risiko dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi ISO)*. Skripsi. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Utomo, Yogi dan Annis Chariri. 2014. Determinan Pengungkapan *Risiko Pada Perusahaan Nonkeuangan Indonesia*. Diponegoro Journal Of Accounting. Volume 3 Nomor 3 tahun 2014.
- Wijananti, Sendy Putri. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Non Keuangan Periode 2011-2013*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Yuniarti, Ika. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi Empiris Pada Laporan Tahunan Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <http://www.idx.co.id>.

**LAMPIRAN****Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Model *Random Effect***

Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/20/18 Time: 05:23				
Sample: 2014 2017				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 60				
Total panel (balanced) observations: 240				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.274427	0.459346	-2.774435	0.0061
X1	0.000412	0.000751	0.548326	0.5842
X2	0.001620	0.012916	0.125423	0.9003
X3	0.000149	0.000385	0.387168	0.6991
X4	0.068269	0.016064	4.249887	0.0000
R-squared	0.941452	Mean dependent var	0.681833	
Adjusted R-squared	0.920495	S.D. dependent var	0.137412	
S.E. of regression	0.038746	Akaike info criterion	-3.440424	
Sum squared resid	0.264214	Schwarz criterion	-2.512254	
Log likelihood	476.8509	Hannan-Quinn criter.	-3.066439	
F-statistic	44.92208	Durbin-Watson stat	2.109028	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data olahan Eviews8 tahun 2018

Halaman ini sengaja dikosongkan